

DAMPAK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TERHADAP NERACA PEMBAYARAN INDONESIA TAHUN 2016.

Oleh:

Prihartini Budi Astuti

e-mail : eti_toro@yahoo.com

ABSTRAK

Perubahan sistem perdagangan internasional menuju liberalisasi, seperti ASEAN menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, memunculkan banyak peluang dan sekaligus juga tantangan-tantangan bagi kondisi neraca pembayaran Indonesia. Peluang yang dimaksud adalah Indonesia dapat memperluas jangkauan pasarnya ke negara-negara ASEAN lainnya. Dampak positif lain dari adanya AEC adalah investor Indonesia dapat memperluas jangkauan investasinya keluar negeri, demikian sebaliknya, Indonesia juga dapat menarik investor dari negara-negara ASEAN yang lain untuk berinvestasi di Indonesia. Sedangkan tantangannya adalah, dengan tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, maka akan semakin besar defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap Neraca Pembayaran Indonesia pada tahun 2017. Dari hasil analisis data, pada tahun 2016, terjadi penurunan jumlah ekspor barang dari USD 148.365 juta pada tahun 2015, menjadi USD 144.441 juta pada tahun 2016. Defisit neraca perdagangan jasa pada tahun 2016 turun menjadi USD6,5 miliar dari USD8,7 miliar pada tahun 2016.

Surplus investasi langsung meningkat dari USD3,0 miliar pada triwulan II-2016 menjadi USD5,2 miliar pada triwulan III-2016 didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik. Perkembangan investasi portofolio sisi kewajiban pada triwulan III-2016 dipengaruhi oleh peningkatan neto pembelian investor asing atas surat berharga berdenominasi rupiah, terutama SUN dan saham Transaksi investasi lainnya pada triwulan III-2016 mengalami defisit USD2,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencatat defisit sebesar USD3,7 miliar, namun berkebalikan dengan surplus di triwulan III-2015 sebesar USD0,4 miliar.

Dari hasil analisis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka pendek (satu tahun), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN belum terlalu berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia.

Kata kunci : Masyarakat Ekonomi ASEAN, ekspor barang, ekspor jasa, impor barang, impor jasa, investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya

PENDAHULUAN

Hubungan ekonomi dengan luar negeri merupakan salah satu bagian dari hubungan internasional secara luas, yang mencakup juga hubungan politik, militer, pendidikan dan kebudayaan. Hubungan ekonomi internasional menyangkut transaksi barang dan jasa, modal, moneter, alat pembayaran dan semuanya berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri. Pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap kondisi ekonomi dalam negeri suatu negara akan tercermin melalui Neraca Pembayaran negara tersebut. Kemudian dari Neraca Pembayaran ini dapat dianalisis hal-hal yang menyangkut perdagangan barang (ekspor-impor), transaksi jasa, nilai tukar, nilai utang dan kewajiban pelunasan, defisit transaksi berjalan, cadangan devisa serta rasio perdagangan internasional.

Di era globalisasi seperti saat ini, ekonomi setiap negara menghadapi persaingan yang semakin ketat. Hal ini kemudian ditandai dengan diimplementasikannya perjanjian perdagangan bebas (*free trade area*) dan perjanjian investasi (*investment agreement*) serta kemajuan teknologi informasi, yang menjadikan semakin terkikisnya hambatan-hambatan perdagangan, lalu lintas keuangan internasional yang semakin bebas, dan keluar masuknya arus modal dan investasi di tiap-tiap negara. Dampak dari bergulirnya era globalisasi ini akan menimbulkan persaingan ketat di antara negara-negara, sehingga hanya negara yang memiliki kemampuan bersaing saja yang akan mampu bertahan.

Integrasi ekonomi negara-negara dalam satu kawasan (regional) atau regionalisme, baik berupa perjanjian

perdagangan bebas, persekutuan pabean (*custom union*) ataupun tingkat integrasi yang lebih tinggi, tampaknya telah menjadi cara yang ditempuh oleh tiap negara atau kumpulan negara saat ini sebagai upaya menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

Menurut Pemfret (2006:63-64), paling tidak terdapat tiga gelombang integrasi regional sejak *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) disepakati pada tahun 1947. Gelombang pertama adalah integrasi regional Eropa di tahun 1970-an yang menempatkan Eropa sebagai aktor utama dalam perdagangan global. Gelombang kedua dipicu oleh ketidakpuasan Amerika terhadap prinsip non-diskriminasi dalam GATT yang bermuara pada pembentukan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) di awal era 1990-an. Gelombang ketiga adalah diinisiasi oleh negara-negara Asia dengan memperkenalkan preferensi tarif seperti *Economic Cooperation Organization* (ECO), *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC), dan *Association of South-East Asian Nation* (ASEAN) (www.kemenkeu.go.id).

Manfaat utama dari integrasi ekonomi yang mendorong integrasi regional berkembang secara global baik di Eropa, Amerika, maupun Asia adalah ekonomi. Integrasi ekonomi akan mendorong ekonomi melalui dua jalur: ukuran integrasi ekonomi dan realokasi sumber daya ekonomi (Bretschger dan Steger, 2004:7-8). Lebih lanjut, Meir (1995:507) menyatakan bahwa integrasi ekonomi di suatu kawasan akan menghasilkan beberapa manfaat bagi negara yang melakukan integrasi, seperti: (1) mendorong berkembangnya industri lokal; (2) peningkatan manfaat perdagangan melalui perbaikan *terms of*

trade; dan (3) mendorong efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi. Menurut Suarez (2000:1) pembentukan integrasi ekonomi di suatu kawasan ditujukan untuk alokasi sumber daya lebih efisien, mendorong persaingan, dan meningkatkan skala ekonomi dalam produksi dan distribusi di antara negara anggota. Ukuran integrasi ekonomi terkait dengan jumlah sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara maka akan mendorong ekonomi untuk memproduksi lebih banyak produk tertentu dan akumulasi produk ini akan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih produktif (www.kemenkeu.go.id)

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Kondisi dan perkembangan perdagangan luar negeri serta neraca pembayaran internasional tidak bisa lepas dari hal-hal yang sedang dan akan berlangsung di dalam percaturan ekonomi global. Situasi dan kecenderungan umum perekonomian dunia dapat dipastikan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Perekonomian dunia yang lesu akan melesukan pula perdagangan antar negara di dunia, termasuk Indonesia, demikian sebaliknya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, hal tersebut merupakan modal ekonomi bangsa yang sudah seharusnya dapat mensejahterakan rakyatnya.

Kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN telah dimulai sejak disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Adanya *ASEAN Economic Community* (AEC) diharapkan akan menciptakan suatu kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Integrasi ekonomi menjanjikan peningkatan kesejahteraan melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar, dorongan mencapai efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

Untuk pembentukan *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015, ASEAN telah menyepakati akan diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada cetak biru (*blueprint*) AEC. *AEC Blueprint* ini memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas (*a single market and production base*); (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce* (*a highly competitive*

economic region); (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam) (*a region of equitable economic development*); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (*a region fully integrated into global economy*). (ASEAN, 2007a dan ASEAN, 2013).

Dari empat pilar utama AEC diatas, terdapat banyak dampak positif dan dampak negatif dari berlakunya AEC terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah semakin meluasnya pangsa pasar dari produk-produk Indonesia. Dengan adanya AEC, diharapkan Indonesia dapat memperluas jangkauan pasarnya ke negara-negara ASEAN lainnya. Dengan adanya AEC, pangsa pasar produk Indonesia yang tadinya hanya sebesar 250 juta (penduduk Indonesia), dapat meningkat menjadi 625 juta orang (jumlah penduduk ASEAN). Selain bertambahnya pangsa pasar produk Indonesia, dengan adanya AEC, Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan ekspor dan impor dengan biaya yang lebih murah, serta semakin terbukanya peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja dari negara-negara ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia, demikian sebaliknya. Dampak positif lain dari adanya AEC adalah investor Indonesia dapat memperluas jangkauan investasinya keluar negeri, demikian

sebaliknya, Indonesia juga dapat menarik investor dari negara-negara ASEAN yang lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Selain dampak positif yang telah dikemukakan diatas, AEC juga mempunyai dampak negatif bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah akan semakin ketatnya persaingan di pasar kerja Indonesia, karena mutu pendidikan tenaga kerja Indonesia masih rendah, dimana pada bulan Februari 2014, jumlah pekerja berpendidikan SMP mencapai 76,4 juta orang, atau sekitar 64% dari total 118 juta pekerja Indonesia. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia, ketergantungan impor bahan baku dan barang setengah jadi, keterbatasan pasokan energi, serta lemahnya daya saing produk Indonesia adalah beberapa hambatan yang dihadapi harus oleh perekonomian Indonesia, sehingga apabila hal tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan AEC justru akan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia (Suroso, 2015).

Selain tantangan yang telah disebutkan diatas, dalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia juga masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal Indonesia antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap AEC, ketidaksiapan daerah menghadapi AEC, tingkat

pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi dan kondisi SDM dan ketenagakerjaan Indonesia.

Disamping tantangan yang ada, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk dapat mengambil manfaat dari implementasi MEA bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi tujuan investasi pemodal dalam negeri ataupun luar negeri. Tingginya investasi tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Potensi lain yang dimiliki oleh Indonesia adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ini (bonus demografi) dapat menjadi kunci sukses bagi peningkatan daya saing Indonesia. Dengan dukungan peningkatan pendidikan dan ketrampilan, maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing nasional.

IDENTIFIKASI MASALAH

Perubahan sistem perdagangan internasional menuju liberalisasi, seperti ASEAN menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, memunculkan banyak peluang dan sekaligus juga tantangan-tantangan bagi kondisi neraca pembayaran Indonesia. Peluang yang dimaksud adalah Indonesia dapat memperluas jangkauan pasarnya ke negara-negara ASEAN lainnya. Dengan adanya AEC, pangsa pasar produk Indonesia yang tadinya hanya sebesar 250 juta (penduduk Indonesia), dapat meningkat menjadi 625 juta orang (jumlah penduduk ASEAN). Dampak positif

lain dari adanya AEC adalah investor Indonesia dapat memperluas jangkauan investasinya keluar negeri, demikian sebaliknya, Indonesia juga dapat menarik investor dari negara-negara ASEAN yang lain untuk berinvestasi di Indonesia. Sedangkan tantangannya adalah, dengan tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, maka akan semakin besar defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap Neraca Pembayaran Indonesia pada tahun 2017.

KAJIAN PUSTAKA

1. ASEAN *Economic Community* (AEC)

ASEAN *Economic Community* (AEC) atau sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga trampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.

Pembicaraan tentang MEA telah dimulai sejak tahun 1997. Para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing

tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.

Selanjutnya, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyetujui pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*), yang kemudian dikenal dengan *Bali Concord II*.

Seiring dengan perkembangannya, pada pertemuan ke-39 ASEAN *Economic Ministers* (AEM) tahun 2007, disepakati mengenai naskah ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint* beserta *Strategic Schedule*-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta *roadmap* yang jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN *Economic Community* tahun 2015. ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint* tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13 (Kemenlu, 2009). Selanjutnya para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi yang mengesahkan suatu cetak biru untuk mewujudkan komunitas ekonomi ASEAN (*Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint*) pada bulan Nopember 2007.

Untuk pembentukan ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015, ASEAN telah menyetujui akan diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada

cetak biru (*blueprint*) AEC. *AEC Blueprint* ini memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas (*a single market and production base*); (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce* (*a highly competitive economic region*); (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam) (*a region of equitable economic development*); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (*a region fully integrated into global economy*). (ASEAN, 2007a dan ASEAN, 2013).

Dalam cetak biru tersebut juga ditetapkan bahwa ada 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan. Tujuh diantaranya adalah sektor barang, yaitu industri agro, perikanan, industri berbasis karet, industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu dan produk kayu, peralatan elektronik, dan otomotif. Sementara sisanya adalah lima sektor

jasa, yakni transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi atau *e-ASEAN*. Dengan terintegrasinya sektor-sektor tersebut tentunya akan membawa implikasi terutama terhadap pergerakan barang dan jasa antar negara ASEAN yang semakin bebas. Di samping itu, integrasi tersebut juga diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan faktor-faktor produksi, khususnya tenaga kerja antar sesama negara anggota.

Berdasarkan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community Blueprint*) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu:

a. Aliran Bebas Barang (*Free Flow of Goods*)

Aliran bebas barang merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal untuk barang (dan jasa) juga akan mempermudah pengembangan jaringan produksi di kawasan dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian dari mata rantai pasokan global.

Melalui ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), ASEAN telah mencapai kemajuan signifikan dalam penghapusan tarif. Namun demikian, aliran bebas barang tidak hanya memerlukan penghapusan tarif, tetapi juga penghapusan non-tarif. Selain itu komponen paling penting lainnya yang

diperlukan untuk mempermudah aliran bebas barang adalah langkah-langkah fasilitasi perdagangan, seperti penyatuan prosedur *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) secara berkesinambungan, pemberlakuan ketentuan asal barang, termasuk prosedur sertifikasi operasionalnya dan penyelarasan prosedur standardisasi dan kesesuaian. Persetujuan *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) akan dikaji ulang dan ditingkatkan menjadi suatu perjanjian yang komprehensif dan merealisasikan aliran bebas barang, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan ASEAN untuk mempercepat proses integrasi ekonomi menuju tahun 2015.

Dalam rangka mewujudkan aliran bebas barang, tarif untuk seluruh barang intra ASEAN akan dihapus sesuai dengan jadwal dan komitmen yang tertuang dalam CEPT-AFTA dan Persetujuan Protokol terkait lainnya. Tindakan untuk mewujudkan kebijakan penghapusan tarif, diantaranya adalah:

- 1) Menghapuskan bea masuk seluruh barang, kecuali barang yang termasuk dalam *Sensitive List* (SL) dan *Highly Sensitive List* (HSL) selambat-lambatnya pada 2012 untuk ASEAN 6 dan selambat-lambatnya pada 2015 untuk CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam),

- dengan fleksibilitas bagi produk-produk sensitifnya selambat-lambatnya pada 2018, berdasarkan ketentuan *Protocol to Amend the CEPT Agreement for the Elimination of Import Duties*;
- 2) Menghapuskan bea masuk produk *Priority Integration Sectors* (PIS) selambat-lambatnya pada 2007 untuk ASEAN-6, dan selambat-lambatnya pada 2012 untuk CLMV, berdasarkan ketentuan *ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Intregation of Priority Sectors*;
 - 3) Menyelesaikan penahapan masuknya produk-produk SL ke dalam skema CEPT dengan tarif 0-5% selambat-lambatnya pada 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2017 untuk Kamboja berdasarkan ketentuan *Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly Sensitive Product*;
 - 4) Memasukkan produk-produk yang telah ditahapkan dalam *General Exception List* (GEL) sesuai dengan persetujuan CEPT.
- Selain kebijakan penghapusan tarif, ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam liberalisasi

tarif. Perhatian utama ASEAN menuju integrasi tahun 2015 akan dititikberatkan pada penghapusan hambatan non-tarif. Tindakan yang dilakukan diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan transparansi dengan mematuhi *Protocol on Notification Procedure* dan menyusun *Surveillance Mechanism* yang efektif;
 - 2) Mematuhi komitmen *stand still and roll back* atas hambatan non-tarif;
 - 3) Menghapuskan seluruh hambatan non-tarif selambat-lambatnya pada 2010 untuk ASEAN-5, pada 2012 untuk Filipina, dan pada 2015 dengan fleksibilitas hingga tahun 2018 untuk CLMV berdasarkan kesepakatan penghapusan *Work Programme on Non-Tariff Barries* (NTBs);
 - 4) Meningkatkan transparansi langkah-langkah kebijakan non-tarif;
 - 5) Sedapat mungkin memiliki aturan-aturan regional dan kebijakan yang konsisten dengan praktik-praktik internasional yang terbaik.
- b. Aliran Bebas Jasa (*Free Flow of Services*)**

Aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan komunitas Ekonomi ASEAN, yang di dalamnya tidak ada hambatan bagi para pemasok jasa ASEAN dalam penyediaan jasanya secara lintas-negara di kawasan, sesuai dengan aturan domestik di setiap negara

anggota. Liberalisasi sektor jasa dirundingkan dalam beberapa putaran negosiasi, khususnya melalui ASEAN *Coordinating Committee on Service* (CCS). Negosiasi untuk sektor tertentu seperti jasa keuangan dan transportasi Negara dilaksanakan melalui kementerian terkait. Dalam meliberalisasi sektor jasa tidak diperkenankan untuk menarik kembali komitmen dan fleksibilitas yang disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Dalam memfasilitasi aliran bebas sektor jasa pada 2015, ASEAN juga tengah mempersiapkan pengakuan terhadap kualifikasi para profesional, dengan tujuan memfasilitasi pergerakannya di kawasan tersebut. Tindakan yang dilakukan diantaranya:

- 1) Mengurangi substansial seluruh hambatan dalam perdagangan jasa untuk empat sektor prioritas bidang jasa, yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata pada 2010 dan untuk sektor prioritas kelima yaitu jasa logistik pada 2013;
- 2) Mengurangi secara substansial seluruh hambatan perdagangan jasa pada 2015;
- 3) Melaksanakan liberalisasi perdagangan jasa melalui putaran negosiasi setiap 2 tahun hingga 2015, yaitu, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015;

- 4) Menargetkan jadwal jumlah minimum subsektor jasa baru yang harus dipenuhi pada setiap putaran, yaitu 10 subsektor pada 2010, 15 subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2014, 7 subsektor pada 2015, yang didasarkan pada klasifikasi umum perjanjian umum perdagangan jasa WTO (GATS);
- 5) Menjadwalkan paket komitmen untuk setiap putaran sesuai parameter sebagai berikut:
 - a) Tidak ada hambatan bagi moda 1 dan 2, dengan pengecualiaan alasan yang dapat diterima (seperti kepentingan dan keamanan nasional) atas persetujuan semua Negara anggota berdasarkan kasus per kasus.
 - b) Mengijinkan penyertaan modal asing (ASEAN) minimal 50% pada 2008 dan 70% pada 2010 bagi empat sektor prioritas; minimal 49% pada 2008, 51% pada 2010 dan 70% pada 2015 bagi sektor jasa lainnya; dan
 - c) Menghapuskan secara progresif hambatan lainnya bagi perdagangan jasa moda 3 pada 2015.
- 6). Menetapkan *parameter liberalism* untuk

- pembatasan *national treatment*, moda 4 dan pembatasan dalam *horizontal commitments* pada setiap putaran pada 2009;
- 7). Menjadwalkan komitmen sesuai dengan parameter yang disepakati untuk pembatasan *national treatment*, moda 4 dan pembatasan pada *horizontal commitments* yang ditentukan pada 2009;
 - 8). Menyelesaikan kompilasi daftar hambatan perdagangan jasa pada Agustus 2008;
 - 9). Mengizinkan seluruh fleksibilitas, meliputi subsektor yang secara penuh dikecualikan dari liberalisasi, dan subsektor yang parameternya belum disepakati dalam penjadwalan komitmen liberalisasi.
 - 10). Menyelesaikan *Mutual Recognition Arrangements* (MRA) antara lain di bidang jasa arsitek, akuntan, *surveying qualification*, tenaga medis pada 2008 dan dokter gigi pada 2009;
 - 11). Mengimplementasikan MRA secepatnya sesuai dengan ketentuan dari setiap MRA;
 - 12). Mengidentifikasi dan mengembangkan MRA untuk jasa profesi lainnya selambat-lambatnya pada tahun 2015; dan
 - 13). Memperkuat pengembangan SDM dan

peningkatkan kemampuan di bidang perdagangan jasa.

Untuk sektor jasa keuangan, upaya –upaya liberalisasi sektor jasa keuangan harus mengizinkan negara-negara anggota untuk menjamin pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi. Dalam melaksanakan upaya-upaya liberalisasi, negara-negara anggota akan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Liberalisasi melalui formula ASEAN minus X dimana negara-negara yang telah siap dapat lebih dahulu melaksanakan liberalisasi dan negara yang belum siap dapat bergabung kemudian; dan
- 2) Proses liberalisasi harus sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi serta keuangan di setiap negara anggota.

Tindakan yang dilakukan untuk mendukung hal diatas adalah dengan: (a) meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap subsektor atau moda-moda sebagaimana diidentifikasi oleh setiap negara anggota pada 2015; dan (b) meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap subsektor atau moda-moda lainnya yang belum diidentifikasi berdasarkan “fleksibilitas yang disepakati sebelumnya” pada tahun 2020.

c. Aliran Bebas Investasi (*Free Flow of Investment*)

Tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) termasuk investasi intra-ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada (*reinvestments*) akan mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis.

Kerja sama investasi ASEAN diimplementasikan melalui *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA)* 1998, sedangkan perlindungan investasi dilaksanakan melalui perjanjian yang terpisah yaitu *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment*, 1987 atau yang bisa di sebut sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA)*

Berdasarkan AIA, seluruh industri (bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut) wajib dibuka dan *national treatment* diberikan bagi investor, baik pada tahap prapendirian (*pre-establishment*) maupun pasca pendirian (*post-establishment*), dengan beberapa pengecualian bagi industri yang tercantum dalam *Temporary Exclusion List (TEL)* dan *Sensitive List (SL)* setiap negara anggota. TEL akan dihapus sesuai dengan jadwal yang disepakati. Meskipun tidak ada jadwal penghapusan yang

jelas, SL akan ditinjau secara berkala.

Untuk mendorong integrasi kawasan, *Framework Agreement on The AIA* dan ASEAN IGA akan ditinjau kembali. Tujuannya adalah membentuk perjanjian investasi yang lebih komprehensif dan berwawasan kedepan dengan menyempurnakan fitur-fitur, ketentuan-ketentuan, dan kewajiban-kewajiban dengan mempertimbangkan praktik-praktik internasional yang terbaik yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ASEAN. ASEAN *Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang akan disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA, akan mencakupi pilar-pilar sebagai berikut:

1) Perlindungan Investasi

Memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor beserta investasi yang akan dicakup dalam persetujuan yang komprehensif, dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Mekanisme penyelesaian sengketa anatar investor dan pemerintah:
- b) Transfer dan repatriasi modal, laba, dividen
- c) Cakupan mengenai pengambilan dan kompensasi transparan
- d) Perlindungan dan pengamanan secara penuh; dan

- e) Pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat huru hara.
- 2) Fasilitas dan Kerjasama
- Prosedur, kebijakann, regulasi, peraturan investasi yang lebih transparan, konsisten dan dapat diprediksi dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a) Menyelaraskan kebijakan investasi untuk mencapai pembangunan industri yang saling melengkapi dan integrasi ekonomi;
 - b) Merampingkan dan menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi;
 - c) Menyebarluaskan informasi investasi; peraturan, ketentuan, kebijakan, dan prosedur, termasuk melalui pusat investasi satu atap atau badan promosi investasi;
 - d) Memperkuat database semua bentuk investasi yang mencakup barang dan jasa untuk fasilitas formulasi kebijakan;
 - e) Memperkuat koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintahan terkait;
 - f) Melakukan konsultasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi investasi; dan
 - g) Mengidentifikasi dan mengupayakan sektor-sektor yang saling melengkapi di seluruh ASEAN, serta integrasi ekonomi liberal
- 3) Promosi dan Kepedulian
- Mendorong ASEAN menjadi kawasan investasi dan jaringan produksi yang terintegrasi, dengan tindakan sebagai berikut:
- a) Menciptakan iklim yang diperlukan untuk mendorong segala bentuk investasi dan wilayah pertumbuhan baru ke dalam ASEAN.
 - b) Mendorong investasi intra-ASEAN, khususnya investasi dari ASEAN-6 ke CLMV
 - c) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan multinasional.
 - d) Mendorong perkembangan industri yang saling melengkapi dan jaringan produksi antara-perusahaan multinasional di ASEAN.
 - e) Mendorong misi promosi investasi bersama yang mengarah pada pembentukan klaster dan jaringan produksi regional.
 - f) Memperluas manfaat dari inisiatif kerjasama industri ASEAN di samping skema AICO untuk mendorong pembentukan klaster dan jaringan produksi kawasan;
 - g) Mengupayakan pembentukan jejaring yang efektif mengenai

persetujuan bilateral penghindaran pengenaan pajak berganda antar-Negara ASEAN

4) Meliberalisasi secara progresif tata aturan investasi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015, dengan tindakan-tindakan:

- a) Memperluas perlakuan non-diskriminasi, termasuk *national treatment* dan *most favoured nation treatment*, bagi investor ASEAN dengan pengecualian yang terbatas, mengurangi, dan apabila dimungkinkan, menghapuskan pengecualian tersebut;
- b) Mengurangi dan apabila dimungkinkan, menghapuskan hambatan-hambatan masuknya investasi di sektor prioritas;
- c) Mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapuskan kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya, termasuk persyaratan performa investasi (*performance requirements*).

d. Aliran Modal yang Lebih Bebas (*Freer Flow of Capital*)

- 1). Kebijakan aliran modal yang lebih bebas dilakukan dengan: memperkuat pengembangan dan

integrasi pasar modal ASEAN, dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Mencapai harmonisasi yang lebih baik dalam hal standar pasar modal ASEAN di bidang ketentuan penawaran surat utang, ketentuan *disclosure* dan aturan distribusi;
- b) Memfasilitasi pengaturan atau persetujuan saling pengakuan atas kualifikasi, pendidikan dan pengalaman para pekerja profesi di pasar modal;
- c) Mengupayakan fleksibilitas yang lebih longgar dalam ketentuan bahasa dan hukum untuk penerbitan sekuritas;
- d) Memperkuat struktur *withholding tax*, apabila dimungkinkan, untuk memperluas basis investasi bagi penerbitan surat utang di ASEAN; dan
- e) Memfasilitasi berbagai upaya yang bersifat *market-driven* untuk membentuk jaringan antar-pasar saham dan pasar obligasi, termasuk aktivitas penghimpunan modal lintas-batas.

- 2). Mengizinkan mobilitas modal yang lebih tinggi. Liberalisasi pergerakan modal berpedoman pada

prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Memastikan liberalisasi *capital account* yang teratur sejalan dengan agenda nasional dan kesiapan ekonomi negara anggota;
- b) Mengizinkan adanya perlindungan yang memadai dalam menghadapi potensi ketidakstabilan ekonomi makro dan risiko sistematis yang timbul sebagai akibat proses liberalisasi, termasuk hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin stabilisasi ekonomi makro; dan
- c) Memastikan manfaat liberalisasi dapat dinikmati oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Tindakan yang dilakukan:

- a) Mengurangi, atau apabila dimungkinkan menghapuskan hambatan, untuk memfasilitasi arus pembayaran dan transfer untuk transaksi neraca berjalan
- b) Mengurangi, atau bila dimungkinkan menghapuskan hambatan, untuk

mendorong investasi asing langsung serta inisiatif untuk mendorong pengembangan pasar modal.

e. Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil (*Free Movement of Skilled Labor*)

Dalam rangka mengizinkan mobilisasi yang terkelola serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa dan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara penerima. ASEAN tengah mengupayakan fasilitasi penerbitan visa dan employment pass bagi tenaga kerja terampil ASEAN yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi antar negara ASEAN.

Dalam rangka memfasilitasi arus bebas perdagangan jasa, ASEAN juga tengah mengupayakan harmonisasi dan standarisasi untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja di kawasan ASEAN. Saat MEA berlaku, di bidang ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati sebagai *free movement of skilled labor*, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi dan akuntan.

2. Neraca Pembayaran

Setiap kegiatan ekonomi suatu negara yang berhubungan dengan negara-negara lain akan

dicatat dalam suatu bentuk laporan keuangan yang disebut neraca pembayaran internasional (*international balance of payments*).

Neraca pembayaran internasional (NPI) merupakan laporan keuangan tentang nilai transaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain dalam bentuk ekspor-impor dan aliran keluar masuk dana yang pencatatannya dilakukan secara sistematis dalam suatu periode tertentu (biasanya triwulan atau tahunan).

NPI juga merupakan catatan yang mencerminkan kondisi cadangan devisa suatu negara. Dalam penyusunannya, NPI mempunyai prinsip yang sama dengan akuntansi pada umumnya. Kegiatan ekspor akan dicatat pada kolom kredit (transaksi plus), sedangkan impor akan dicatat pada kolom debit (transaksi minus). Suatu transaksi akan dimasukkan ke kolom kredit jika transaksi itu dapat menghasilkan tambahan valuta asing bagi suatu negara, demikian sebaliknya.

Secara umum, NPI terdiri atas hal-hal sebagai berikut (Latumaerissa, 2015):

a. *Current account*

Merupakan laporan yang berisikan tentang catatan transaksi barang dan jasa suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu. *Current account* (transaksi berjalan) juga menggambarkan pembayaran-pembayaran jangka pendek. *Current account* mempunyai 3 bagian, yaitu:

1) Neraca perdagangan (*Balance of Trade, BoT*)

Dalam neraca ini dicatat transaksi ekspor dan impor barang selama satu periode. *BoT* dikatakan mengalami defisit jika nilai ekspor barang lebih kecil daripada nilai impor barang, demikian sebaliknya, dikatakan surplus jika nilai ekspor barang lebih besar daripada nilai impor barang.

2) Neraca jasa, neraca jasa ini mencatat hal-hal sebagai berikut:

a) Ekspor impor jasa selama satu periode tertentu. Impor jasa yang dilakukan misalnya penggunaan jasa transportasi negara lain atau perusahaan asing. Contohnya ketika kita menggunakan maskapai penerbangan asing ketika melakukan ibadah haji. Sedangkan ekspor jasa terjadi bila ada pembelian jasa dalam negeri oleh pihak asing. Misalnya ada turis yang berkunjung ke Indonesia menikmati jasa hotel, restoran, transportasi serta jasa-jasa lainnya.

b) Pendapatan modal, yaitu pendapatan yang diperoleh karena memiliki aset-aset finansial (saham dan obligasi) serta aset fisik (berupa properti) di negara lain. Misalnya Indonesia harus membayar bunga, sewa dan laba pada negara lain yang menjadi tempat aset tersebut diinvestasikan. Pembayaran ini akan

dicatat sebagai *income payments on investment*, sebaliknya, jika bila Indonesia yang menerima deviden, sewa, bunga dan laba dari negara lain, akan dicatat sebagai *income received on investment*. Selisihnya disebut sebagai *net investment income*.

- 3) *Transfer payment*. Neraca ini mencatat transaksi-transaksi yang bukan sebagai akibat balas jasa, misalnya pembayaran dalam bentuk hibah dari negara lain ke Indonesia, atau pemberian beasiswa dari negara lain kepada mahasiswa Indonesia.

b. *Capital account*

Merupakan bagian dari NPI yang mencatat arus modal masuk dan arus modal keluar selama periode tertentu. *Capital account* menunjukkan catatan arus pembayaran dan penerimaan jangka panjang. Neraca modal ini terdiri dari:

- 1). Neraca modal pemerintah → catatan arus keluar masuk modal di sektor pemerintah
- 2). Neraca modal swasta → catatan arus keluar masuk modal yang terjadi di sektor swasta (dunia usaha)

Capital account dikatakan defisit bila *capital outflow* lebih besar daripada *capital inflow*, demikian sebaliknya.

- c. *Settlement account* (neraca penyeimbang), merupakan bagian dari NPI yang berisikan arus modal keluar masuk emas dan pembelian atau penjualan mata uang domestik atau valuta asing oleh pemerintah. Neraca

penyeimbang ini digunakan untuk menjaga neraca saldo NPI selalu bernilai 0 (nol). Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

- 1) Apabila saldo NPI mengalami defisit ($NPI < 0$), maka pemerintah harus membeli valuta asing untuk meningkatkan jumlah cadangan devisa, agar permintaan valas seimbang dengan penawaran valas sehingga $NPI = 0$ dan kurs tetap stabil
- 2) Sebaliknya, jika NPI surplus ($NPI > 0$), maka pemerintah harus mengurangi dengan menjual rupiah, agar kurs tetap stabil.

d. *Error and omission* (selisih perhitungan), merupakan bagian dari NPI yang berisikan transaksi-transaksi yang tidak tercatat. Hal ini bisa terjadi karena ketidaklengkapan informasi, atau adanya transaksi yang tidak tercatat.

PEMBAHASAN

Pembentukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 memunculkan berbagai peluang serta tantangan bagi negara-negara yang termasuk di dalamnya. Bagi Indonesia, terbentuknya pasar tunggal ini membawa konsekuensi pada kesiapan sumber daya yang dimiliki, yaitu apakah sumber daya yang ada sudah

siap berkompetisi dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Perlu diketahui bahwa pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 bukanlah sebuah proyek "mercusuar" tanpa *roadmap* yang jelas. MEA 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN dengan visi yang kuat. MEA 2015 hanyalah salah satu pilar dari 10 visi mewujudkan ASEAN Community. Kesepuluh pilar visi ASEAN Community tersebut adalah *outward looking, economic integration, harmonious environment, prosperity, caring societies, common regional identity, living in peace, stability, democratic, dan shared cultural heritage* (Kementerian Luar Negeri, 2014).

Dengan terintegrasinya kawasan Asia Tenggara, kawasan ini akan mampu menghadapi tantangan dan intervensi dari luar, baik secara ekonomi maupun militer. Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah inisiator dari terbentuknya integrasi kawasan ASEAN. Hanya, perjalanan setiap negara dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ASEAN yang terintegrasi ini berbeda-beda. Ada negara yang dengan cepat bisa mempersiapkan diri, namun ada juga negara yang terlambat. Karakteristik, ukuran ekonomi, dan permasalahan yang dihadapi setiap negara yang berbeda juga turut memengaruhi kecepatan setiap negara dalam menghadapi MEA 2015.

Studi Bank Dunia (2013) menyebutkan, daya saing produk ekspor Indonesia relatif tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lain, terutama kaitannya dengan nilai tambah produk ekspor kita. Komposisi ekspor kita terbesar didominasi komoditas

(*resource based*) dan barang primer (*primary product*). Kondisi ini menyebabkan ekspor Indonesia rentan dengan gejolak harga. Hal ini pula yang saat ini kita rasakan, ekspor kita melemah akibat pelemahan perekonomian dunia yang menyebabkan harga komoditas dunia juga ikut menurun.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana dampak adanya MEA terhadap kondisi neraca pembayaran Indonesia, yang mencerminkan posisi Indonesia di dunia internasional, terutama dalam kaitannya dengan hubungan ekonomi. Untuk melihat dampak MEA terhadap neraca pembayaran Indonesia, peneliti akan membandingkan kondisi neraca pembayaran Indonesia sebelum MEA (tahun 2014 dan 2015) dengan kondisi neraca pembayaran sesudah MEA (tahun 2016).

1. Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2014

Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan IV tahun 2014 mencatat surplus sebesar US\$24 miliar. Surplus ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial sebesar US\$7,8 miliar yang lebih besar dari defisit transaksi berjalan sebesar US\$6,2 miliar. Surplus tersebut pada gilirannya mendorong kenaikan posisi cadangan devisa dari US\$111,2 miliar pada triwulan III-2014 menjadi US\$111,9 miliar pada triwulan IV-2014. Jumlah tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,4 bulan.

Defisit transaksi berjalan triwulan IV-2014 lebih rendah dibandingkan dengan defisit US\$7,0 miliar (2,99% PDB) pada triwulan III-2014. Perbaikan kinerja transaksi

berjalan tersebut terutama didukung oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang seiring naiknya surplus neraca perdagangan non-migas dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas. Surplus neraca perdagangan nonmigas meningkat karena pertumbuhan ekspor (1,4%, qtq) yang melampaui pertumbuhan impor (0,2%, qtq). Pertumbuhan ekspor non-migas ditopang oleh kenaikan permintaan, khususnya minyak nabati dan produk manufaktur, yang terjadi di saat tren penurunan harga komoditas masih berlanjut. Di sisi migas, meskipun volume impor minyak meningkat, defisit neraca perdagangan migas menyusut sebagai dampak dari terus melemahnya harga minyak mentah dunia. Meski membaik dari triwulan sebelumnya, defisit transaksi berjalan triwulan IV-2014 tercatat lebih besar dibandingkan dengan defisit sebesar US\$4,3miliar (2,05% PDB) pada periode yang sama tahun 2013, terutama karena melemahnya kinerja ekspor nonmigas. Selain itu, di tengah turunnya harga minyak, defisit neraca migas triwulan IV-2014 juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena lebih rendahnya *lifting* migas yang disertai meningkatnya volume impor minyak.

Sementara itu, persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia dan imbal hasil yang tetap menarik mendorong aliran masuk modal asing yang cukup besar dan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Pada triwulan IV-2014, surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment*, FDI) dan surplus

investasi lainnya yang berasal dari penarikan simpanan penduduk di luar negeri dan penarikan pinjaman luar negeri korporasi. Namun demikian, surplus transaksi modal dan finansial ini masih lebih rendah dibandingkan dengan surplus triwulan III-2014 sebesar US\$14,7 miliar karena keluarnya dana asing dari instrumen portofolio rupiah di bulan Desember 2014 yang dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran investor terkait rencana kenaikan Fed Fund Rate akibat rilis data perbaikan ekonomi AS. Secara keseluruhan tahun, kinerja NPI 2014 mencatat perbaikan signifikan didukung oleh keberhasilan sinergi kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. NPI 2014 mencatat surplus US\$15,2 miliar setelah sebelumnya mengalami defisit US\$7,3 miliar pada 2013. Perbaikan tersebut ditopang oleh menyusutnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan menurun menjadi US\$26,2 miliar (2,95% PDB) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US\$29,1 miliar (3,18% PDB). Perbaikan kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya impor akibat melemahnya permintaan domestik sebagai dampak dari moderasi pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi ekspor, meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur yang membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi AS, juga turut membantu perbaikan kinerja tersebut. Selain itu, menyusutnya defisit neraca jasa dan meningkatnya surplus neraca pendapatan sekunder

turut berkontribusi terhadap perbaikan kinerja transaksi berjalan. Pada sisi lain, surplus transaksi modal dan finansial tahun 2014 mencapai US\$43,6miliar, dari sebelumnya US\$22,0 miliar pada

2013. Meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial ini didorong oleh kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

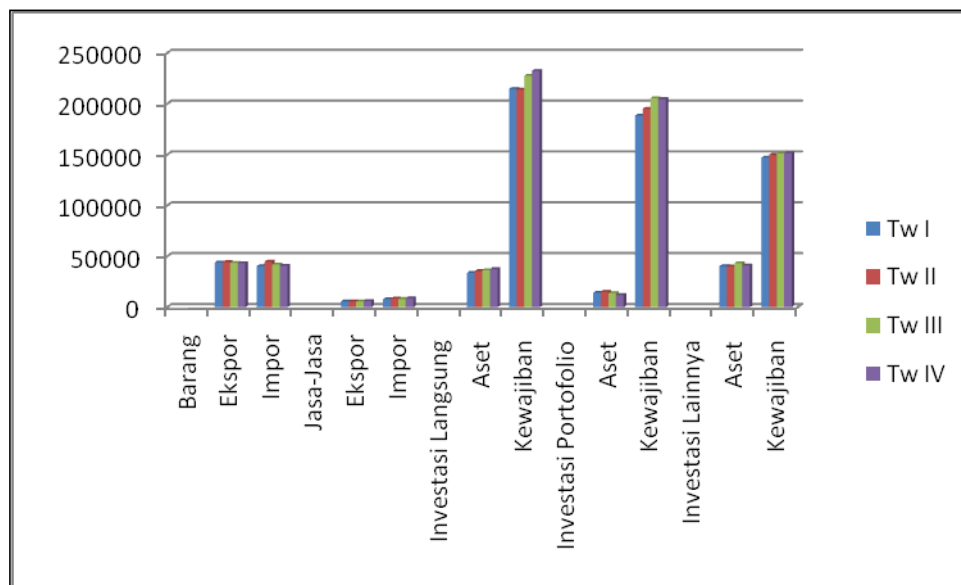
Berikut ini ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2014:

Tabel 1. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2014

Transaksi Berjalan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total
Barang					
Ekspor	43.937	44.505	43.606	43.245	175.293
Impor	40.588	44.880	42.046	40.797	168.311
Selisih	3.349	(375)	1.560	2.448	6.982
Jasa-Jasa					
Ekspor	5.887	5.721	5.698	6.226	23.532
Impor	8.018	8.552	8.183	8.787	33.540
Selisih	(2.131)	(2.831)	(2.485)	(2.561)	(10.008)
Transaksi Finansial	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total
Investasi Langsung					
Aset	33.872	35.622	36.453	37.515	-
Kewajiban	214.814	214.117	227.752	232.496	-
Investasi Portofolio					
Aset	14.293	15.285	13.986	12.172	-
Kewajiban	188.615	195.222	205.516	204.826	-
Investasi Lainnya					
Aset	40.434	40.145	43.378	41.118	-
Kewajiban	147.152	149.938	151.232	151.604	-

Sumber : Bank Indonesia, 2015 (diolah)

Gambar 1. Grafik Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2014



Sumber : Bank Indonesia, 2015 (diolah)

2. Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2015

Neraca Pembayaran Indonesia triwulan IV-2015 mencatat surplus sebesar USD 5,1 miliar, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit sebesar USD 4,5 miliar. Surplus ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial sebesar USD 9,5 miliar yang melampaui defisit transaksi berjalan sebesar USD 5,1 miliar (2,39% PDB). Surplus NPI Tw IV-2015 pada gilirannya mendorong kenaikan posisi cadangan devisa dari USD 101,7 miliar pada akhir triwulan III-2015 menjadi 105,9 miliar pada akhir triwulan IV-2015. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 7,4 bulan.

Defisit transaksi berjalan triwulan IV 2015 lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar USD 4,2 miliar (1,94% PDB). Kenaikan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber

dari penurunan surplus neraca perdagangan non-migas karena impor non-migas tumbuh 7,5% (qtq) seiring dengan meningkatnya permintaan domestik pada triwulan IV 2015. Peningkatan impor terbesar terjadi pada kelompok barang modal, barang konsumsi dan bahan baku. Sementara itu, ekspor non-migas terkontraksi 4,2% (qtq) dipengaruhi oleh permintaan global yang masih lemah dan terus menurunnya harga komoditas. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menyusut seiring turunnya volume impor minyak dan harga minyak mentah dunia. Meskipun mengalami peningkatan defisit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kinerja transaksi berjalan triwulan IV 2015 membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yang mencatat defisit sebesar USD 6,0 miliar (2,70% PDB).

Surplus transaksi modal dan finansial meningkat signifikan seiring menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global dan

membaihnya keyakinan terhadap prospek perekonomian Indonesia. Surplus transaksi modal dan finansial triwulan IV 2015 lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar USD 0,28 miliar. Kenaikan surplus transaksi modal dan finansial tersebut terutama didukung oleh kembali meningkatnya arus masuk investasi portofolio pada obligasi pemerintah, termasuk *global bond*. Selain itu, kenaikan transaksi modal

dan finansial didukung pula oleh kenaikan investasi lainnya dan aliran masuk investasi langsung asing (FDI). Kenaikan FDI terutama pada sektor pertambangan, keuangan dan manufaktur sejalan dengan perbaikan investasi domestik. Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan IV 2015 relatif sama besar dengan yang tercatat pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2015

Transaksi Berjalan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total
Barang					
Ekspor	37.827	39.685	36.086	34.767	148.365
Impor	34.764	35.561	31.945	32.806	135.076
Selisih	3.063	4.124	4.141	1.961	13.289
Jasa-Jasa					
Ekspor	5.555	5.101	5.486	6.087	22.229
Impor	7.371	7.736	7.597	7.826	30.530
Selisih	(1.816)	(2.635)	(2.111)	(1.739)	(8.301)
Transaksi Finansial	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total
Investasi Langsung					
Aset	39.336	41.872	40.490	40.990	-
Kewajiban	250.483	243.570	235.694	234.049	-
Investasi Portofolio					
Aset	12.148	12.985	13.417	13.336	-
Kewajiban	213.959	205.223	176.043	201.250	-
Investasi Lainnya					
Aset	45.332	50.706	52.647	51.997	-
Kewajiban	150.911	148.707	151.771	153.881	-

Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

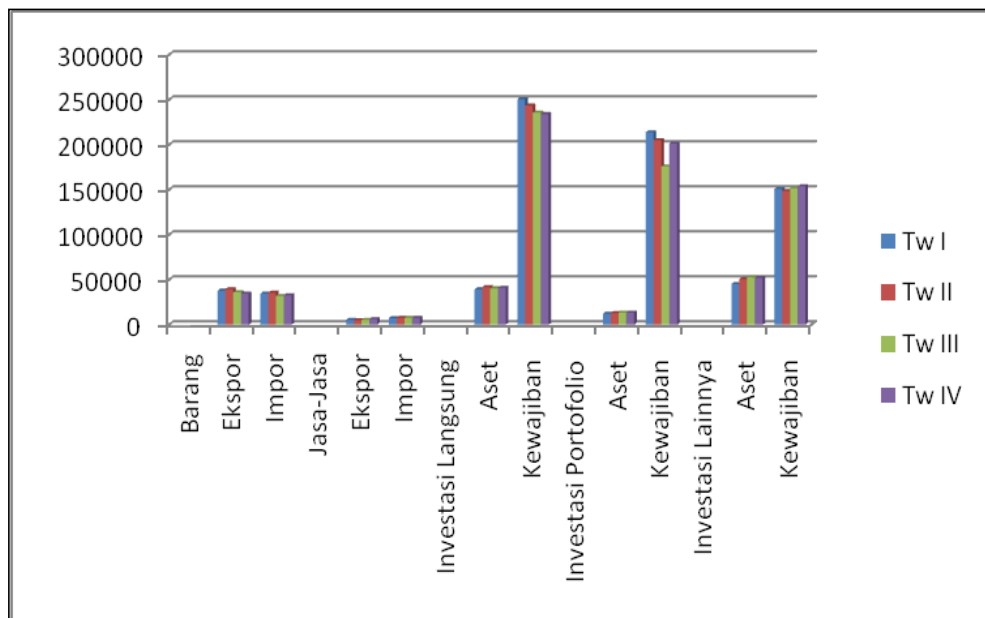
Secara keseluruhan tahun, NPI 2015 mengalami tekanan di tengah dinamika perkembangan global dan domestik. NPI 2015 mengalami defisit USD 1,1 miliar setelah tahun sebelumnya mencatat surplus USD 15,2 miliar. Tekanan terhadap kinerja NPI tersebut bersumber dari

penurunan surplus transaksi modal dan finansial yang tidak dapat sepenuhnya membiayai defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan sebesar USD 17,8 miliar, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai USD 27,5 miliar. Perbaikan tersebut

disebabkan penurunan impor yang lebih besar daripada penurunan eksportnya, serta perbaikan neraca jasa dan neraca pendapatan. Penurunan impor diakibatkan melemahnya permintaan domestik sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Sedangkan penurunan ekspor disebabkan karena melemahnya permintaan eksternal akibat melemahnya perekonomian dunia. Transaksi modal dan finansial pada tahun 2015 turun menjadi USD 171 miliar dari sebelumnya USD 45,0 miliar pada tahun 2014. Hal tersebut

disebabkan karena aliran modal masuk investasi langsung dan kebutuhan pendanaan korporasi melalui pinjaman luar negeri yang menurun seiring dengan melambatnya perekonomian dalam negeri. Penurunan transaksi modal dan finansial juga disebabkan karena penurunan aliran masuk modal portofolio asing dan investasi lainnya. Penurunan investasi lainnya diakibatkan oleh kenaikan simpanan sektor swasta di bank luar negeri akibat persepsi negatif pelaku ekonomi terhadap perekonomian Indonesia yang melemah.

Gambar 2. Grafik Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2015



Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

3. Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III 2016 mencatat

peningkatan surplus yang signifikan, ditopang oleh menurunnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan

finansial. Surplus NPI tercatat sebesar USD5,5 miliar, meningkat signifikan dibandingkan dengan surplus sebesar USD2,2 miliar pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan semakin baiknya keseimbangan eksternal perekonomian dan turut menopang berlanjutnya stabilitas makroekonomi.

Defisit transaksi berjalan menurun didorong oleh perbaikan neraca perdagangan barang dan jasa. Defisit transaksi berjalan menurun dari USD5,0 miliar (2,2% PDB) pada

triwulan II 2016 menjadi USD4,5 miliar (1,8% PDB) pada triwulan III 2016. Penurunan tersebut ditopang oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non-migas sejalan dengan meningkatnya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas, serta menyempitnya defisit neraca perdagangan migas seiring dengan meningkatnya ekspor gas. Selain itu, defisit neraca jasa juga menurun terutama karena surplus neraca jasa perjalanan yang meningkat pada triwulan laporan.

Tabel 3. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016

Transaksi Berjalan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Total *
Barang					
Ekspor	33.039	36.282	34.891	40.229	144.441
Impor	30.391	32.533	30.967	35.160	129.051
Selisih	2.648	3.749	3.924	5.069	15.390
Jasa-Jasa					
Ekspor	5.946	5.429	5.974	6.801	24.150
Impor	6.987	7.702	7.588	8.360	30.637
Selisih	-1.816	-2.635	-2.111	-1.739	6.487
Transaksi Finansial	Tw I	Tw II	Tw III		
Investasi Langsung					
Aset	41.170	41.149	84.724	-	-
Kewajiban	245.778	251.898	270.429	-	-
Investasi Portofolio					
Aset	13.497	13.026	13.374	-	-
Kewajiban	215.677	226.976	240.706	-	-
Investasi Lainnya					
Aset	52.580	56.158	104.282	-	-
Kewajiban	153.928	155.164	151.660	-	-

Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

Surplus transaksi modal dan finansial terus meningkat didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik dan meredanya risiko global. Surplus

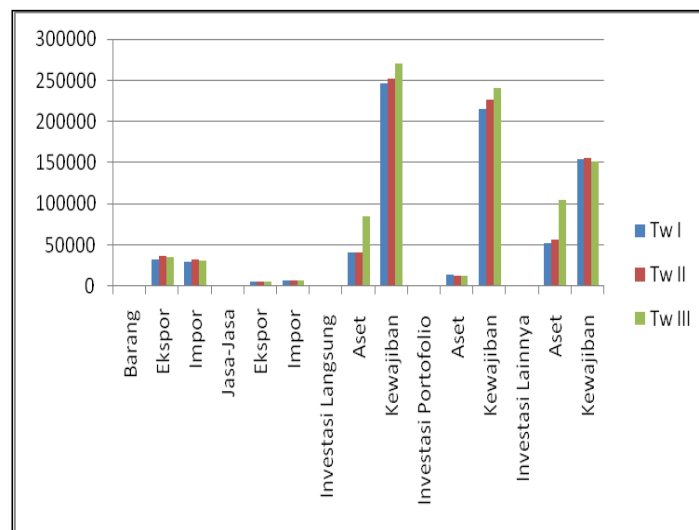
transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2016 mencapai USD9,4 miliar, lebih besar dibandingkan dengan surplus pada triwulan II 2016 sebesar USD7,6 miliar maupun

surplus pada triwulan I-2016 sebesar USD4,4 miliar. Peningkatan ini terutama ditopang oleh aliran masuk modal investasi langsung yang meningkat signifikan menjadi USD5,2 miliar, dipengaruhi oleh neto penarikan utang korporasi antar-afiliasi pada triwulan III-2016 setelah pada triwulan sebelumnya mencatat neto pembayaran utang. Di samping itu, meski menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, surplus investasi portofolio masih tercatat dalam jumlah yang besar, didukung oleh sentimen positif terkait implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Surplus investasi portofolio terutama berasal dari pembelian SBN rupiah dan saham oleh investor asing yang

meningkat serta *net inflows* dari penjualan surat utang asing oleh penduduk. Selain itu, defisit investasi lainnya tercatat lebih rendah ditopang oleh neto penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan neto penarikan simpanan penduduk di luar negeri.

Perkembangan NPI tersebut pada gilirannya memperkuat cadangan devisa. Posisi cadangan devisa meningkat dari USD109,8 miliar pada akhir triwulan II 2016 menjadi USD115,7 miliar pada akhir triwulan III 2016. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,5 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional

Gambar 3. Grafik Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016



Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

Secara lebih terperinci, berikut ini perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia dari tahun 2014-2016, sehingga dapat dilihat bagaimana dampak MEA terhadap Neraca Pembayaran Indonesia pada tahun 2016:

Tabel 4. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2014-2016

Item	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Ekspor Barang	175.293	148.365	144.441

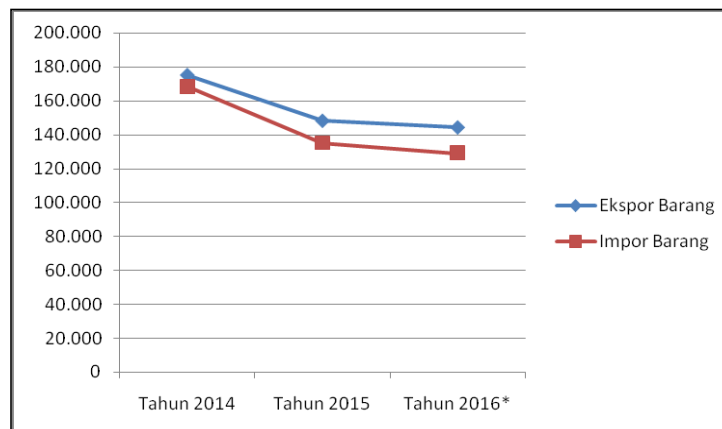
Impor Barang	168.311	135.076	129.051
Ekspor Jasa	23.532	22.229	24.150
Impor Jasa	33.540	30.530	30.637
Aset (Investasi Langsung)	37.515	40.990	84.724 *
Kewajiban (Investasi Langsung)	232.496	234.049	270.429 *
Aset (Investasi Portofolio)	12.172	13.336	13.374 *
Kewajiban (Investasi Portofolio)	204.826	201.250	240.706 *
Aset (Investasi Lainnya)	41.118	51.997	104.282 *
Kewajiban (Investasi Lainnya)	151.604	153.881	151.660 *

Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

Catatan : * sampai triwulan III-2016

1. Ekspor – Impor Barang

Gambar 4. Grafik Ekspor – Impor Barang Tahun 2014-2016



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah ekspor pada tahun 2016 (pasca MEA) jika dibanding jumlah ekspor pada tahun 2015 (sebelum MEA), akan tetapi tren ekspor dari tahun 2014 memang sedang menurun, dimana hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian dunia yang sedang melemah. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016 hanya 3,1%, lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 3,2%. Dengan demikian, banyak

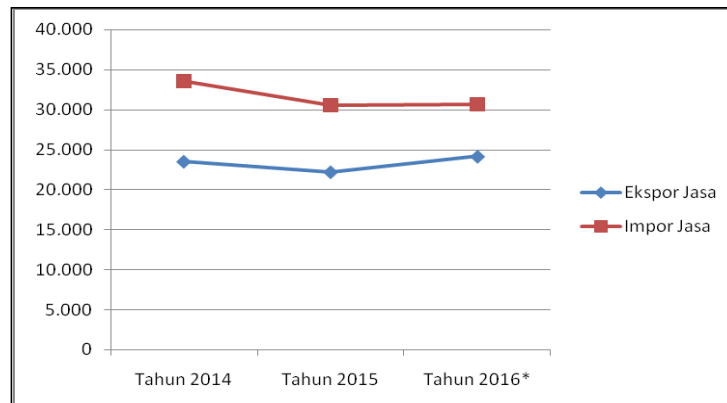
negara memutuskan untuk mengalihkan strategi pertumbuhan ekonomi mereka ke pasar domestik masing-masing. Strategi ini pada akhirnya membuat volume perdagangan dunia melemah, hanya sebesar 1%, turun dari 2% pada tahun sebelumnya. Hal ini menurunkan kinerja ekspor banyak negara. Selain itu, harga komoditas ekspor Indonesia seperti batubara, kelapa sawit dan tembaga tercatat rendah sepanjang triwulan I-2016 dan baru meningkat pada triwulan IV-2016 (www.bi.go.id). Meskipun

demikian, neraca perdagangan masih mengalami surplus karena jumlah impor mengalami

penurunan dalam jumlah yang lebih besar.

2. Ekspor – Impor Jasa

Gambar 5. Grafik Ekspor – Impor Jasa Tahun 2014-2016



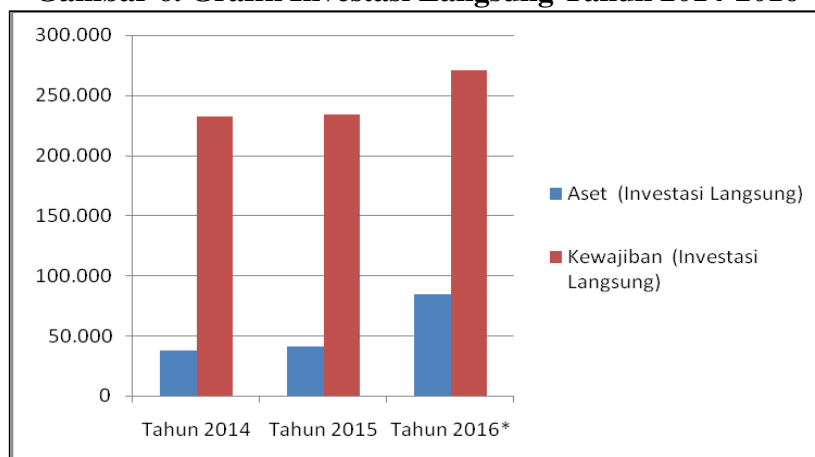
Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

Neraca jasa terdiri dari jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, perjalanan, transportasi, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, jasa personal, kultural dan rekreasi, jasa bisnis lainnya serta jasa pemerintah. Ekspor jasa pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun 2015, meskipun jumlah ekspor jasa selalu lebih rendah daripada jumlah impor jasa. Ekspor jasa selalu lebih rendah daripada impor jasa karena Indonesia selama ini hanya mengandalkan sektor pariwisata, sementara impor jasa sebagian besar terdiri dari industri jasa asuransi, pengangkutan dan perbankan.

Kenaikan jumlah ekspor jasa dari USD 22.229 juta pada tahun 2015 menjadi USD 24.150 juta pada tahun 2016 tentu saja merupakan hal yang menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, defisit neraca perdagangan jasa pada tahun 2016 turun menjadi USD6,5 miliar dari USD8,7 miliar pada tahun 2015. Hal ini terutama disumbang oleh penurunan pembayaran jasa *freight*, seiring dengan penurunan impor barang. Selain itu, perbaikan neraca jasa juga didukung oleh kenaikan penerimaan jasa perjalanan seiring dengan meningkatnya jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia dari 9,79 juta pada 2015 menjadi 10,93 juta pada tahun 2016.

3. Investasi Langsung

Gambar 6. Grafik Investasi Langsung Tahun 2014-2016



Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

Surplus investasi langsung meningkat dari USD3,0 miliar pada triwulan II-2016 menjadi USD5,2 miliar pada triwulan III-2016 didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik. Prospek perekonomian domestik dan iklim investasi yang lebih baik tersebut tercermin pada peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia, dari 106 menjadi 91. Berdasarkan arah investasi, investasi langsung asing di Indonesia mencatat peningkatan neto arus masuk modal asing dari USD3,7 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi USD4,4 miliar. Arus masuk modal asing tersebut juga lebih besar dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD4,0 miliar. Berdasarkan negara asal investasi, aliran masuk modal PMA masih didominasi oleh negara di kawasan ASEAN, disusul oleh Jepang dan negara *emerging market* di Asia (termasuk Tiongkok). Realisasi PMA terutama berasal dari negara Singapura senilai USD2,2 miliar, Jepang senilai USD1,6 miliar,

Tiongkok senilai USD0,6 miliar, British Virgin Islands senilai USD0,5 miliar, dan Belanda senilai USD0,5 miliar. Kelima negara tersebut memberikan kontribusi PMA senilai USD5,4 miliar atau sebesar 73,0% dari total PMA.

4. Investasi Portofolio

Berbagai perkembangan domestik terutama sentimen positif terkait implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang berjalan dengan baik menjadi faktor yang mendorong tetap besarnya neto aliran masuk investasi portofolio pada triwulan III-2016 sebesar USD6,5 miliar, meskipun lebih rendah dari aliran masuk pada triwulan sebelumnya sebesar USD8,3 miliar.

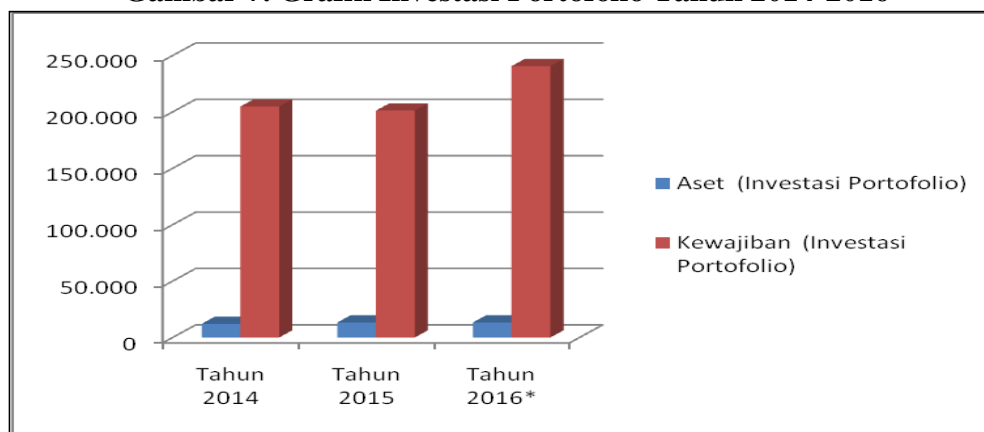
Perkembangan investasi portofolio sisi kewajiban pada triwulan III 2016 dipengaruhi oleh peningkatan neto pembelian investor asing atas surat berharga berdenominasi rupiah, terutama SUN dan saham. Peningkatan tersebut didorong oleh sentimen positif implementasi UU

Pengampunan Pajak, meskipun di sisi lain, peningkatan sentimen terhadap *timing* kenaikan The Fed Fund Rate (FFR) sempat memicu *outflow* dana asing dari saham pada September 2016. Secara keseluruhan, arus masuk modal portofolio asing mencapai USD4,6 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan arus masuk pada triwulan sebelumnya sebesar USD7,9 miliar karena tidak adanya penerbitan

obligasi global pemerintah pada triwulan laporan.

Sementara di sisi aset, transaksi investasi portofolio pada triwulan III- 2016 mengalami surplus sebesar USD2,0 miliar, lebih besar dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya, terutama dipengaruhi *net inflows* dari penjualan surat utang asing oleh penduduk.

Gambar 7. Grafik Investasi Portofolio Tahun 2014-2016



Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

5. Investasi Lainnya

Transaksi investasi lainnya pada triwulan III-2016 mengalami defisit USD2,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencatat defisit sebesar USD3,7 miliar, namun berkebalikan dengan surplus di triwulan III-2015 sebesar USD0,4 miliar. Penurunan defisit pada triwulan laporan tersebut terutama didorong oleh neto penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan neto penarikan simpanan penduduk di luar negeri.

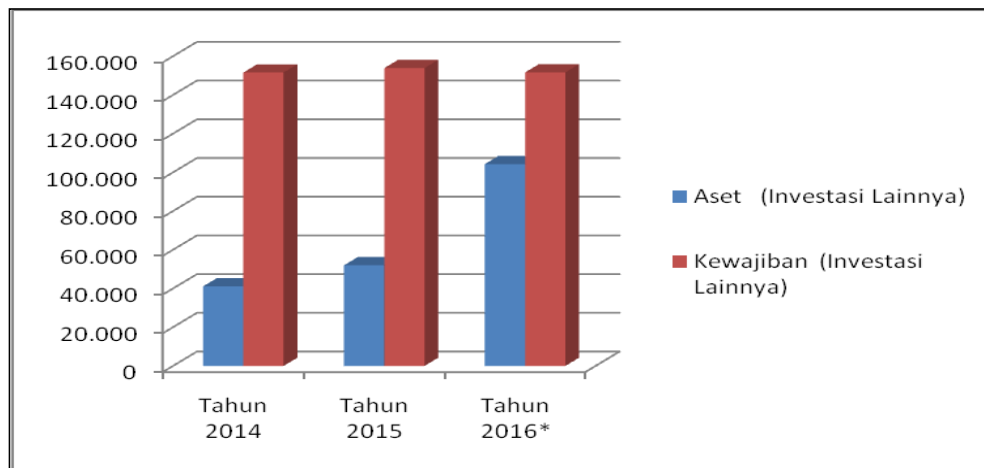
Pada sisi aset, transaksi investasi lainnya sektor swasta

pada triwulan laporan mengalami surplus USD2,0 miliar, berbalik dari defisit (arus keluar bersih) USD3,0 miliar pada triwulan sebelumnya. Surplus pada triwulan laporan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan penarikan simpanan sektor swasta di luar negeri

Pada sisi kewajiban, transaksi investasi lainnya sektor swasta pada triwulan laporan mencatat defisit sebesar USD3,0 miliar, berbalik dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD1,2 miliar. Defisit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya neto pembayaran pinjaman luar negeri dan utang

dagang serta neto penarikan simpanan non-residen di bank domestik

Gambar 8. Grafik Investasi Lainnya Tahun 2014-2016



Sumber : Bank Indonesia, 2016 (diolah)

KESIMPULAN

Dari data-data yang sudah dipaparkan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016, terjadi penurunan jumlah ekspor barang dari USD 148.365 juta pada tahun 2015, menjadi USD 144.441 juta pada tahun 2016. Penurunan jumlah ekspor ini tidak semata-mata disebabkan karena berlakunya MEA pada bulan Desember 2015, tetapi lebih merupakan akibat dari melemahnya kondisi perekonomian global yang hanya tumbuh sebesar 3,1%.
2. Defisit neraca perdagangan jasa pada tahun 2016 turun menjadi USD6,5 miliar dari USD8,7 miliar pada tahun 2016. Hal ini terutama disumbang oleh penurunan pembayaran jasa *freight*, seiring dengan penurunan impor barang. Selain itu, perbaikan neraca jasa juga didukung oleh kenaikan penerimaan jasa perjalanan seiring dengan meningkatnya jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia dari 9,79 juta pada 2015 menjadi 10,93 juta pada tahun 2016.
3. Surplus investasi langsung meningkat dari USD3,0 miliar pada triwulan II-2016 menjadi USD5,2 miliar pada triwulan III-2016 didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik.
4. Perkembangan investasi portofolio sisi kewajiban pada triwulan III-2016 dipengaruhi oleh peningkatan neto pembelian investor asing atas surat berharga berdenominasi rupiah, terutama SUN dan saham. Peningkatan tersebut didorong oleh sentimen positif implementasi UU

- Pengampunan Pajak, meskipun di sisi lain, peningkatan sentimen terhadap *timing* kenaikan The Fed Fund Rate (FFR) sempat memicu *outflow* dana asing dari saham pada September 2016.
5. Transaksi investasi lainnya pada triwulan III-2016 mengalami defisit USD2,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencatat defisit sebesar USD3,7 miliar, namun berkebalikan dengan surplus di triwulan III-2015 sebesar USD0,4 miliar. Penurunan defisit pada triwulan laporan tersebut terutama didorong oleh neto penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan neto penarikan simpanan penduduk di luar negeri.
 6. Dari hasil analisis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka pendek (satu tahun), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN belum terlalu berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia. Naik turunnya jumlah ekspor, impor maupun investasi pada tahun 2016 lebih disebabkan karena kondisi perekonomian dunia yang sedang mengalami gejolak. Diperlukan analisis lebih lanjut dalam jangka panjang tentang bagaimana dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap Neraca Pembayaran Indonesia.
- Bank Indonesia. 2014. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan II 2014*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2014. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan III 2014*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2015. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan IV 2014*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2015. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan I 2015*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2015. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan II 2015*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2015. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan III 2015*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2016. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan IV 2015*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2016. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan I 2016*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2016. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan II 2016*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2016. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan III 2016*. Jakarta : Bank Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2014. *Laporan Neraca Pembayaran : Realisasi Triwulan I 2014*. Jakarta : Bank Indonesia
- Latumaerissa, Julius R. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Kadin Indonesia. 2013. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Peluang*

dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia. Policy Paper No. 15 Maret 2013. Jakarta: Kadin Indonesia

Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009. *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC Blueprint)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa Serta Tenaga Kerja di Indonesia*. Nomor Laporan : Lap-10/KF.4/2014. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Analisa Daya*